

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

Akuntansi lingkungan adalah upaya dalam menspesifikasikan pembiayaan atau pengeluaran perusahaan dana atau pemerintah dalam kegiatan konservasi lingkungan sekitar atau disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan / *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kegiatan CSR ini tentu mengakibatkan adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan akan dimasukkan ke dalam pos “Lingkungan”, maka dari itu akan timbul namanya *environmental cost* atau biaya lingkungan / konservasi lingkungan yang harus ditanggung. Akuntansi lingkungan adalah suatu kerangka kerja pengukuran secara kuantitatif terhadap kegiatan konservasi lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan (Lindrianasari, 2007).

Menurut Lindrianasari, (2007) aktifitas-aktifitas yang dapat dilakukan dalam konservasi lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Konservasi terhadap kondisi yang berpengaruh terhadap kesehatan makhluk hidup dan lingkungan hidup yang berasal dari polusi udara, polusi air, pencemaran tanah, kebisingan, getaran, bau busuk, dan lain sebagainya.
2. Konservasi terhadap kondisi yang berpengaruh secara menyeluruh seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, serta pencemaran air laut.
3. Konservasi terhadap sumber daya. Konservasi ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan, mengendalikan sampah, dari kegiatan produksi perusahaan, penggunaan material dari hasil daur ulang, dan lain sebagainya.

Akuntansi lingkungan umumnya diterapkan oleh perusahaan yang memiliki perhatian dan minat terhadap kelestarian lingkungan, kebersinambungan (*sustainability*), efektivitas lingkungan (*ecoeffectiveness*), efisiensi lingkungan (*ecoeficiency*), dan menerapkannya secara langsung dengan banyak sarana pemasaran dalam manajemen strategik (Cohen & Robbins, 2011).

Aktivitas dalam akuntansi lingkungan dijelaskan oleh Cohen dan Robbins (2011) sebagai berikut:

“Environmental accounting collects, analyzes, assesses, and prepares reports of both environmental and financial data with a view toward reducing environmental effect and costs. This form of accounting is central to many aspects of governmental policy as well. Consequently, environmental accounting has become a key aspect of green business and responsible economic development”.

Artinya adalah bahwa akuntansi lingkungan mengumpulkan, menganalisis, memperkirakan, dan menyiapkan laporan baik data lingkungan maupun finansial dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan biaya. Bentuk akuntansi ini memusat pada beberapa aspek kebijakan pemerintah sebaik mungkin. Konsekuensinya, akuntansi lingkungan menjadi aspek penting dalam green business concept dan pengembangan perekonomian yang bertanggung jawab.

Melalui penerapan akuntansi lingkungan maka diharapkan lingkungan akan terjaga kelestariannya, karena dalam menerapkan akuntansi lingkungan maka perusahaan akan secara sukarela mematuhi kebijakan pemerintah di mana perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya (Aniela, 2012). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Beer & Friend (2006) membuktikan bahwa pengungkapan semua biaya lingkungan, baik internal maupun eksternal, dan mengalokasikan biaya-biaya ini berdasarkan tipe biaya dan pemicu biaya dalam sebuah akuntansi lingkungan yang terstruktur akan memberikan kontribusi baik pada kinerja lingkungan.

Pengungkapan akuntansi lingkungan di dukung oleh beberapa teori, salah satu nya adalah Teori Legitimasi (Deegan, 2002). Teori lain yang mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan adalah *stakeholder theory*. Dalam Kusumaningtyas (2013) mengungkapkan bahwa *stakeholder theory* memperhatikan keseluruhan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan.

1.1.1 Teori Legitimasi

Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan karena legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan kedepan. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat dalam mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat, operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan masyarakat (O'Donovan, 2000).

Komunikasi menjadi jalur penting untuk memperoleh legitimasi dari pihak yang diharapkan perusahaan. Dalam Moir (2001) berpendapat bahwa organisasi dapat menggunakan empat strategi legitimasi ketika organisasi menemui ancaman legitimasi, yaitu dengan :

1. Meyakinkan stakeholder melalui edukasi dan informasi mengenai kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambilnya atau dapat dilakukan pula dengan menjustifikasi para stakeholder tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan organisasi
2. Mengubah persepsi organisasi, tanpa mengubah kinerja aktual organisasi
3. Mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan lewat pendekatan emotive symbols untuk memanipulasi persepsi stakeholder

4. Mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi

Keempat strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi perusahaan kepada publik, seperti pengungkapan dalam annual report.

Perusahaan dapat mengungkapkan informasi-informasi yang dapat memperkuat legitimasinya, misalnya dengan menyebutkan penghargaan-penghargaan lingkungan yang pernah diraih atau program-program keselamatan yang telah diterapkan perusahaan jika mereka ingin mendapat legitimasi dari stakeholder pemerhati lingkungan ataupun karyawan. Langkah yang sama juga dilakukan jika perusahaan ingin mendapat legitimasi dari pemegang saham. Hal tersebut dilakukan dengan mengungkapkan keunggulan saham perusahaan, prospek, laba dan sebagainya. Melalui pengungkapan, perusahaan juga dapat mengklarifikasi atau bahkan membantah berita-berita negatif yang mungkin muncul di media.

Meskipun demikian, tujuan akhir dari pemerolehan legitimasi tidak lain adalah untuk menunjang tujuan utama perusahaan dalam usaha mendapatkan profit maksimum. Lebih lanjut, legitimasi ini akan meningkatkan reputasi perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai perusahaan tersebut (Amri, 2020).

1.1.2 Teori Stakeholder

Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Perusahaan hanya diarahkan untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang dianggap penting dan berpengaruh dan perhatian perusahaan akan diarahkan pada *stakeholder* yang dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Mereka yakin bahwa teori *stakeholder* mengabaikan pengaruh masyarakat luas (*society as a*

whole) terhadap penyediaan informasi dalam pelaporan keuangan. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful *stakeholder*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholder-nya (Chariri & Ghozali, 2007).

Tunggal (2008) menyatakan bahwa teori *stakeholder* dapat dilihat dalam tiga pendekatan, deskriptif, instrumental, dan normatif.

1.1.2.1 *Deskriptif*

Pendekatan deskriptif pada intinya menyatakan bahwa, *stakeholder* secara sederhana merupakan deskripsi yang realitas mengenai bagaimana sebuah perusahaan beroperasi. Teori *stakeholder* dalam pendekatan deskriptif, bertujuan untuk memahami bagaimana manajer menangani kepentingan *stakeholder* dengan tetap menjalankan kepentingan perusahaan. Manajer dituntut untuk mengarahkan energi mereka terhadap seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya terhadap pemilik perusahaan saja.

1.1.2.2 *Instrumental*

Teori *stakeholder* dalam pendekatan instrumental menyatakan bahwa, salah satu strategi pihak manajemen perusahaan untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik adalah dengan memperhatikan para pemangku kepentingan. Pendekatan instrumental bertujuan untuk mempelajari konsekuensi yang ditanggung perusahaan, dengan melihat dari pengelolaan hubungan *stakeholder* dan berbagai tujuan tata kelola perusahaan yang telah dicapai.

1.1.2.3 *Normatif*

Teori *stakeholder* dalam pendekatan normatif menyatakan bahwa setiap orang atau kelompok yang telah memberikan kontribusi terhadap nilai suatu perusahaan memiliki hak moral untuk menerima imbalan (*rewards*) dari perusahaan, dan hal ini menjadi suatu kewajiban bagi manajemen untuk memenuhi apa yang menjadi hak para pemangku kepentingan. Pendekatan normatif juga bertujuan untuk mengidentifikasi pedoman moral atau filosofis terkait dengan aktivitas ataupun manajemen perusahaan.

1.1.3 Teori Akuntansi Hijau

Akuntansi Hijau merupakan paradigma baru dalam akuntansi yang menganjurkan bahwa fokus dari proses akuntansi tidak hanya tertuju pada transaksi, peristiwa, atau objek keuangan, tetapi juga pada objek, transaksi, atau peristiwa sosial dan lingkungan. Berdasarkan teori tiga pilar dasar Elkington (1997), Akuntansi Hijau memiliki tiga pilar dasar. Pilar pertama adalah akuntansi lingkungan, proses akuntansi yang mengakui, mengukur mencatat, meringkas, dan melaporkan transaksi, peristiwa, atau objek lingkungan untuk menghasilkan informasi akuntansi lingkungan. Pilar kedua yaitu akuntansi sosial, proses akuntansi yang mengakui, mengukur nilai, mencatat, meringkas, dan melaporkan informasi akuntansi terkait transaksi atau peristiwa sosial masyarakat dari suatu entitas untuk menghasilkan informasi akuntansi sosial. Pilar ketiga ialah akuntansi keuangan. Ketiga pilar dasar informasi tersebut saling terintegrasi, agar dapat menghasilkan informasi akuntansi yang terpadu, utuh, dan relevan yang berguna bagi pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi maupun non-ekonomi (Lako, 2018).

1.1.3.1 Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi Hijau

Lako (2018) menyatakan sama seperti karakter kualitatif dari informasi akuntansi yang berlaku umum selama ini (FASB dalam SFAC No. 2, 1978; SAK, 2014). Informasi Akuntansi Hijau juga harus memenuhi karakteristik kualitatif berikut ini:

1. Para pengguna informasi akuntansi adalah para pemangku kepentingan, yaitu pihak manajemen, pemegang saham, investor atau pemilik, kreditor, pemasok, konsumen, karyawan, pemerintah, dan masyarakat luas yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan entitas korporasi.
2. Kendala informasi akuntansi hijau adalah perbandingan keterukuran antara biaya dan manfaatnya, upaya dan hasilnya, materialitas informasi yang disajikan, dan pengungkapan informasi akuntansi kuantitatif dan kualitatif secara terintegritas.
3. Syarat khusus dan pervasif yang dibutuhkan para pemakai informasi akuntansi adalah informasi akuntansi yang disajikan kepada para pihak pemakai harus dapat dipahami dan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi.
4. Kriteria atau syarat utama dalam penyajian informasi Akuntansi Hijau adalah : 1) terintegritas dan akuntabel, yaitu informasi akuntansi yang disajikan dalam pelaporan akuntansi hijau harus memperhitungkan, mengintegrasikan, dan mempertanggungjawabkan semua informasi akuntansi keuangan, sosial, dan lingkungan secara terpadu dalam satu paket pelaporan; 2) relevan, yaitu informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan para pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi akuntansi yang disajikan harus memiliki nilai umpan-balik dan nilai prediktif, serta disajikan tepat waktu;

5. Reliabel, yaitu informasi akuntansi yang disajikan harus reliabel atau andal agar dapat dipercaya dan bermanfaat bagi para pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi. Untuk itu, informasi akuntansi yang disajikan harus dapat diverifikasi, valid, akurat, dan netral; 4) transparan, yaitu informasi akuntansi harus disajikan secara transparan dan jujur; 5) keterbandingan, yaitu informasi akuntansi yang disajikan memiliki daya banding antar periode dan disajikan secara konsisten dari waktu ke waktu.

Selain memenuhi karakteristik kualitatif di atas, ada tiga karakteristik kualitatif khusus dari informasi akuntansi hijau yang sangat bermanfaat dalam evaluasi, penilaian pengambilan keputusan para pemakai (*primary decision-specific qualities*).

1. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu informasi akuntansi yang disajikan memperhitungkan semua aspek informasi entitas, terutama informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan entitas dan biaya-manfaat (*costs-benefits*) dari dampak (*impacts*) yang ditimbulkan.
2. Terintegrasi dan komprehensif yaitu informasi akuntansi yang disajikan merupakan hasil integrasi antara informasi akuntansi keuangan dengan informasi akuntansi sosial dan lingkungan yang disajikan secara komprehensif dalam satu paket pelaporan akuntansi.
3. Transparan (*transparency*) yaitu informasi akuntansi terintegrasi harus disajikan secara jujur, akuntabel dan transparan agar tidak menyesatkan para pihak dalam evaluasi, penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi.

1.2 Pengungkapan Akuntansi Lingkungan

Menurut Lako (2011) pengungkapan informasi akuntansi lingkungan mencakup informasi tentang:

1. Kontribusi lingkungan alam, energi, sumber daya manusia (karyawan) dan masyarakat.
2. Dampak-dampak ekonomis, sosial, dan ekologis yang positif dan negatif dari aktivitas bisnis perusahaan terhadap lingkungan alam, energi, karyawan, dan masyarakat.
3. Kontribusi perusahaan untuk mengatasi masalah – masalah ekologis.

Berikut ini adalah indikator dari masing – masing dimensi yang disebutkan dalam teori Andreas Lako (2011).

Tabel 2.1
Indikator Informasi Akuntansi Lingkungan

No.	Dimensi	Indikator
1.	Kontribusi lingkungan alam, sumber daya manusia (karyawan), dan masyarakat	1. Penerapan sistem manajemen lingkungan 2. Upaya efisiensi energi 3. Upaya penurunan emisi 4. Implementasi 3R limbah B3 dan Non-B3 5. Konservasi air dan penurunan beban pencemaran air 6. Perlindungan keanekaragaman hayati 7. Program pengembangan masyarakat
2.	Dampak – dampak ekonomis, sosial, dan ekologis yang positif dan negatif dari aktivitas bisnis perusahaan terhadap lingkungan alam, energi, karyawan, dan masyarakat.	1. Dampak positif dari aktifitas bisnis perusahaan 2. Dampak negatif dari perusahaan
3.	Kontribusi perusahaan untuk mengatasi masalah – masalah ekologis.	1. Pengendalian pencemaran air 2. Pengendalian pencemaran udara 3. Pengelolaan limbah B3 4. Pengendalian pencemaran air laut 5. Potensi kerusakan lahan

Sumber: Lako (2011:156)

Selain menaati peraturan lingkungan, sebaiknya kebijakan perusahaan untuk peduli dengan lingkungan harus lebih berorientasi pada upaya membangun *sustainable management* yaitu kepedulian manajemen terhadap lingkungan secara substantif. Dalam laporan keuangan, perusahaan dapat menyajikan kepedulian lingkungan guna membantu menciptakan citra positif dimata investor, pemerintah dan masyarakat. Ada empat model komprehensif

yang dapat dijadikan sebagai alternatif model peraturan keuangan, yaitu: “(1) model normatif, (2) model hijau, (3) model intensif lingkungan, dan (4) model aset nasional” (Nur'ainun & Lestari, 2017).

Dalam akuntansi lingkungan, menurut System of Environmental Economic Accounts (SEEA) terdapat empat kategori akun atau elemen, selanjutnya menurut Aronson dan Lofgren (2010:130) “Empat kategori akun atau elemen tersebut yaitu (1) akun terkait polutan dan material, (2) akun untuk perlindungan lingkungan dan beban manajemen lingkungan, (3) akun untuk aset sumber daya alam, (4) penilaian dari aliran non pasar dan keseluruhan beban yang terkait dengan lingkungan”. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kategori akun atau elemen akuntansi lingkungan :

1. Akun terkait polutan dan material

Akun ini meliputi data fisik yang berhubungan dengan polusi, energi, dan material. Akun ini mengikuti struktur akuntansi SNA yang menyediakan informasi level industri mengenai penggunaan energi dan material sebagai input produksi dan menghasilkan polutan dan limbah. Tujuan dari akun ini adalah untuk menunjukkan keterkaitan antara lingkungan dengan ekonomi.

2. Akun untuk perlindungan dan beban manajemen lingkungan

Akun ini mengidentifikasi biaya yang terjadi pada industri, pemerintah, dan rumah tangga untuk melindungi lingkungan atau mengelola sumber daya alam. Akun ini ada karena untuk mengidentifikasi dan mengukur respon masyarakat terhadap perhatian akan lingkungan melalui persediaan dan permintaan barang dan jasa, melalui perilaku adopsi produksi dan konsumsi yang ditujukan untuk mencegah degradasi lingkungan dan dengan pengelolaan sumber daya lingkungan yang berkesinambungan.

3. Akun untuk aset sumber daya alam

Akun ini meliputi akun lingkungan seperti tanah, ikan, hutan, air, dan mineral. Akun ini diukur baik secara finansial maupun fisik. Pengukuran secara finansial ini akan memiliki kegunaan dalam hal penilaian aset baik secara praktis maupun konseptual, sedangkan

pengukuran secara fisik akan memudahkan perusahaan untuk mempelajari persediaan modal.

4. Penilaian dari aliran non pasar dan keseluruhan beban lain yang terkait dengan lingkungan

Akun ini difokuskan pada pengukuran degradasi dan kemampuan dalam menjawab kebijakan yang ditetapkan. Teknik yang biasa digunakan adalah cost-based pricing techniques seperti penyesuaian struktural (structural adjustment) abatement, biaya restorasi yang digambarkan sebagaimana jika ada kerusakan. Teknik lainnya adalah benefits-based pricing technique yaitu teknik yang menggunakan metode preferensi yang terungkap dan tersurat.

2.3 Tata Kelola Perusahaan / *Corporate Governance* (CG)

Corporate governance yang didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Iswara, 2014).

Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *Cadbury Committee, Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari Corporate Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Secara lebih rinci, terminologi Corporate Governance dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pengurus (pengelola) perusahaan, dan para pemegang saham (Rahmawati, Rikumahu, & Dillak, 2017).

Pengertian corporate governance dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholders. Kategori kedua, lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan (Iswara, 2014).

Peran dominan perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN dalam menentukan arah maju-mundurnya perekonomian Indonesia menjadi indikasi bahwa peranan *good corporate governance* tidak bisa lagi diabaikan. Perusahaan-perusahaan berskala besar sangat mempengaruhi kinerja perekonomian nasional karena mereka memberikan kontribusi yang besar terhadap penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan terkait dengan sektor lain serta aliran arus modal yang melintasi batas negara. Hal tersebut sudah terbukti dengan terjadinya krisis ekonomi yang dipicu krisis mata uang di Indonesia dan di Asia sejak Juli 1997. Krisis pada dasarnya disebabkan oleh kemelut utang jangka pendek perusahaan-perusahaan besar yang lantas mengakibatkan goncangan pada kurs mata uang dan selanjutnya berdampak pada instabilitas perekonomian. Kemelut utang di berbagai perusahaan swasta besar itu sendiri pada intinya bersumber pada *bad corporate governance*. Pengelolaan perusahaan di masa itu tidak didasarkan pada prinsip-prinsip yang memperhatikan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* (Basri, 2009).

2.3.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidak lengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Kontrak yang dimaksud disini adalah kontrak antara prinsipal (pemberi kerja, misalnya pemegang saham atau pimpinan perusahaan dengan agen (penerima perintah, misalnya manajemen atau bawahan). Teori keagenan meramal jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal (adanya situasi

ketimpangan informasi) dan kepentingan agen dan prinsipal berbeda, maka akan terjadi principal agent problem di mana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal. Beban yang muncul karena tindakan manajemen tersebut menjadi *agency cost* (Gudono, 2014).

2.3.1.1 Prinsip Dasar Pengelolaan Perusahaan yang Baik

Prinsip-prinsip dasar dari Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Prinsip-prinsip good corporate governance yang dikembangkan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham

Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, memperoleh informasi yang relevan mengenai perusahaan secara berkala dan teratur, ikut berperan dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), memilih anggota dewan komisaris dan direksi, dan selanjutnya, memperoleh pembagian keuntungan perusahaan/dividen.

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham

Seluruh pemegang saham harus memiliki, kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka.

3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan

Memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders, seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong

kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha.

4. Keterbukaan dan Transparansi

Memberikan jaminan adanya pengungkapan yang tepat waktu akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Selain itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi.

5. Akuntabilitas Dewan Komisaris (*Board of Directors*)

Menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris serta akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan para pemegang saham.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, prinsip – prinsip dari *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut.

1. Transparansi / *Transparency*

Keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

2. Akuntabilitas / *Accountability*

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Prinsip akuntabilitas memberi kejelasan hak dan kewajiban antara pemegang saham, dewan direksi, dan dewan komisaris.

3. Pertanggungjawaban / *Responsibility*

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Contoh dari prinsip pertanggungjawaban adalah keselamatan pekerja, kesehatan pekerja, pajak, dsb.

4. Kemandirian / *Independency*

Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang – undang serta prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran / *Fairness*

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasar perjanjian dan peraturan undang – undang.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Tata Kelola Perusahaan

Menurut Aldridge & Sutojo (2005), *good corporate governance* mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.

Sedangkan menurut Daniri (2006), manfaat penerapan *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
2. Memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan.
3. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

2.4 Kinerja Keuangan

Menurut Herremans, McInnes, & Akathaporn (1993), keberhasilan pimpinan sebagai pengelola perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuangan atau kinerja keuangannya yang ditunjukkan oleh jumlah penjualan, tenaga kerja, harta yang dimiliki dan analisis rasio, yang disajikan dalam laporan keuangan. Beberapa pokok pikiran mengenai hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja keuangan, antara lain:

1. Pokok pikiran yang menggambarkan kebijakan konvensional; berpendapat bahwa terdapat biaya tambahan yang signifikan dan akan menghilangkan peluang perolehan laba untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, sehingga akan menurunkan profitabilitas;
2. Biaya tambahan khusus untuk melaksanakan tanggung jawab sosial akan menghasilkan dampak netral (*balance*) terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan tambahan biaya yang dikeluarkan akan tertutupi oleh keuntungan efisiensi yang ditimbulkan oleh pengeluaran biaya tersebut;

Pokok pikiran yang memprediksikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berdampak positif terhadap profitabilitas.

2.5 Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja keuangan merupakan kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi (Riadi, 2016). Adapun penilaian kinerja menurut (Srimindarti, 2006) adalah penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Menurut Munawir (2012:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

Menurut Jumingan (2006:242), kinerja keuangan dapat diukur dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut.

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).
2. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
3. Analisis Persentase per-Komponen (common size), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8. Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan

modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan.

Sedangkan bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.

Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan (Riadi, 2016).

2.6 Penelitian Terdahulu

Teori-teori terdahulu yang ditemukan melalui berbagai penelitian sebelumnya memiliki peran penting sebagai dasar atau acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

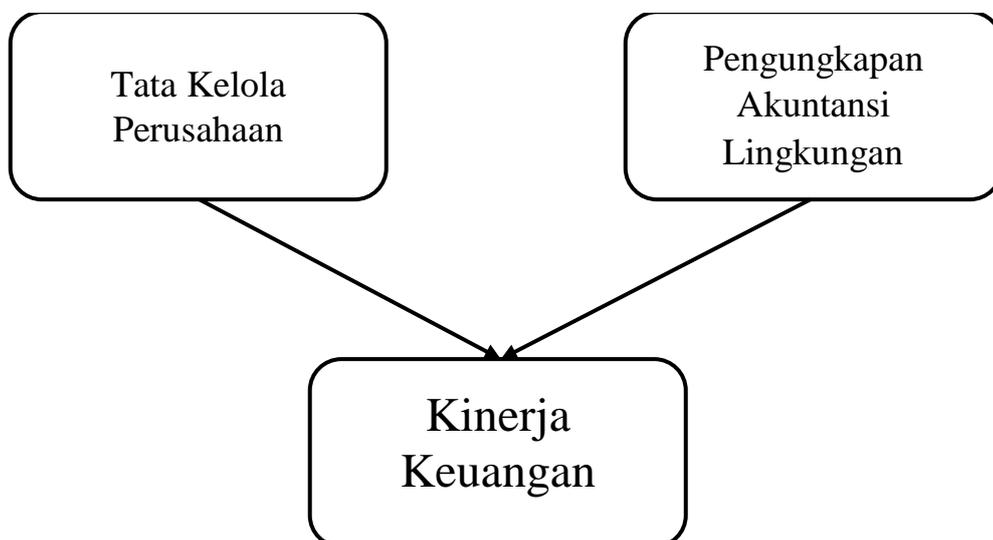
Nama Peneliti	Objek Penelitian	Metode	Variabel	Hasil
Prasetyo Widyono Iswara (2014)	Perusahaan yang terdaftar di BEI yang memiliki CGPI dan mempunyai laporan keuangan tahun 2005-2007	Regresi Linear Berganda	Independen: Tata Kelola Perusahaan Dependen: Kinerja Keuangan	Tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
Ariyani & Gunawan (2014)	Perusahaan Perbankan yang mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun 2005-2010	Regresi Berganda	Independen: Tata kelola perusahaan dan Tanggung jawab Sosial Perusahaan Dependen: Kinerja Keuangan (ROA & ROE)	Tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
Jayanti, Lestari, dan Rosdiana (2015)	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2013	Regresi Linier Sederhana	Independen: Pengungkapan Akuntansi Lingkungan Dependen: Kinerja Keuangan Perusahaan	Pengungkapan akuntansi lingkungan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan
Yuniep Mujiati Suaidah, (2018)	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sub sektor kemasan dan plastik 2015 – 2017	<i>Moderated Regression Analysis</i>	Independen: Pengungkapan Akuntansi Lingkungan dan Kepemilikan Saham Dependen: Kinerja Keuangan	Pengungkapan akuntansi lingkungan dan kepemilikan saham berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
Rahmawati, Rikumahu, & Dillak, (2017)	Perusahaan Sub Sektor Batubara yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2015	Regresi Data Panel diolah melalui Eviews 9	Independen: Dewan Direksi, Komisaris, Komite Audit & CSR Dependen: Kinerja Keuangan	Dewan direksi dan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan komite audit dan CSR tidak berpengaruh.

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Informasi mengenai aktivitas atau kinerja perusahaan merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi *stakeholder* khususnya investor. Bagi *stakeholder*, pengungkapan informasi mengenai aktivitas atau kinerja perusahaan menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan yang akan menjadi tempat bagi para investor dalam menanamkan investasinya. Perusahaan yang memiliki Pengungkapan Lingkungan yang baik merupakan suatu *good news* bagi investor dan calon investor. Perusahaan yang memiliki *good news* yang baik cenderung akan meningkatkan Pengungkapan Lingkungan dalam laporan tahunannya.

Perusahaan yang memiliki tingkat Pengungkapan Lingkungan yang tinggi akan direspon secara positif oleh investor melalui fluktuasi harga saham perusahaan. Harga saham secara relatif dalam industri yang bersangkutan merupakan cerminan pencapaian perusahaan. Sedangkan perusahaan dengan pengungkapan lingkungan yang tinggi dalam laporan keuangannya akan lebih dapat diandalkan. Laporan keuangan yang handal tersebut akan berpengaruh secara positif terhadap, dimana investor akan merespon secara positif dengan fluktuasi harga pasar saham yang semakin tinggi. Sehingga kerangka pemikiran penelitian ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.7.1 Pengungkapan Akuntansi Lingkungan Berpengaruh pada Kinerja Keuangan

H1 : Pengungkapan akuntansi lingkungan berkontribusi terhadap kinerja keuangan

Pengungkapan akuntansi lingkungan akan menimbulkan opini masyarakat bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawabnya kepada lingkungan dan sosial. Hal ini akan menimbulkan adanya kepercayaan dari *shareholders* dan memungkinkan untuk mendatangkan lebih banyak investor. Investor ini tentunya akan menanamkan modalnya di perusahaan yang menyebabkan sumber dana untuk operasional lebih besar dan dapat mendukung operasional perusahaan secara lebih. Dengan dukungan tersebut, bisa saja perusahaan mendatangkan profitabilitas lebih banyak, sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat.

Melalui beberapa penelitian, pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan pada kinerja keuangan, memiliki beberapa hasil yang berbeda. Nuar'ainun & Lestari (2017), menguji pengungkapan akuntansi lingkungan terhadap kinerja keuangan dan pengungkapan akuntansi lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Suaidah (2018), menguji pengungkapan akuntansi lingkungan & kepemilikan saham terhadap kinerja keuangan, menghasilkan pengungkapan akuntansi lingkungan dan kepemilikan saham berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.7.2 Tata Kelola Perusahaan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

H2 : Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan

H3 : Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Tata kelola perusahaan yang baik, akan menimbulkan hasil yang baik. Hasil yang dimaksud adalah semua *output* yang dihasilkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan, kinerja perusahaan, dan lain-lain. Pada penelitian ini, yang disoroti adalah kinerja keuangan. Secara logis, dengan

tata kelola perusahaan yang baik, akan menghasilkan *output* yang baik, baik berupa operasionalnya dan berupa pelaporannya.

Iswara (2014), menguji tata kelola perusahaan pada kinerja keuangan menemukan bahwa tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Rahmawati & Rikumahu (2017), Menguji Dewan Direksi, Komisaris, Komite Audit dan CSR Terhadap Kinerja Keuangan Menghasilkan Dewan direksi dan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan komite audit dan CSR tidak berpengaruh.